

Pembangunan Aparatur 2015-2019: Apakah Agenda Kebijakan Yang Tersisa?

Wahyudi Kumorotomo, Ph.D

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

kumoro@map.ugm.ac.id

Strategi untuk Memahami Konteks Pembangunan Aparatur

1. Pemahaman baru tentang *governance* → lebih holistik, mengandalkan jejaring, demokratis. (Kahler, 2009; Bevir, 2010; Donahue & Zeckhauser, 2011)
2. Reformasi harus menyentuh budaya birokrasi yang masih berkembang → “Memahami aparat” (Tullock, 1978; Stivers, 2008). Remunerasi harus disertai pembudayaan kinerja.
3. Studi internasional menunjukkan bahwa hanya 39% dari program reformasi birokrasi di banyak negara yg berhasil (World Bank, 2007). Tantangan: melakukan reformasi yang berbasis budaya, terukur, berkesinambungan.
4. Konteks RPJP 2005-2025: Tahap-1: Penataan Kelembagaan, Tahap-2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Tahap 3 (2015-2019): Profesionalisme aparatur.

Decentralized &
Fragmented Policy
Environment under
SBY:
SBY Presidency
(2004-2014)

Political;

- Coalition; policy making less effective
- Direct local elections (since 2005): policy of “politicking”
- Weakening legitimacy due to corruption cases.

“Better” **Economic Recovery;**

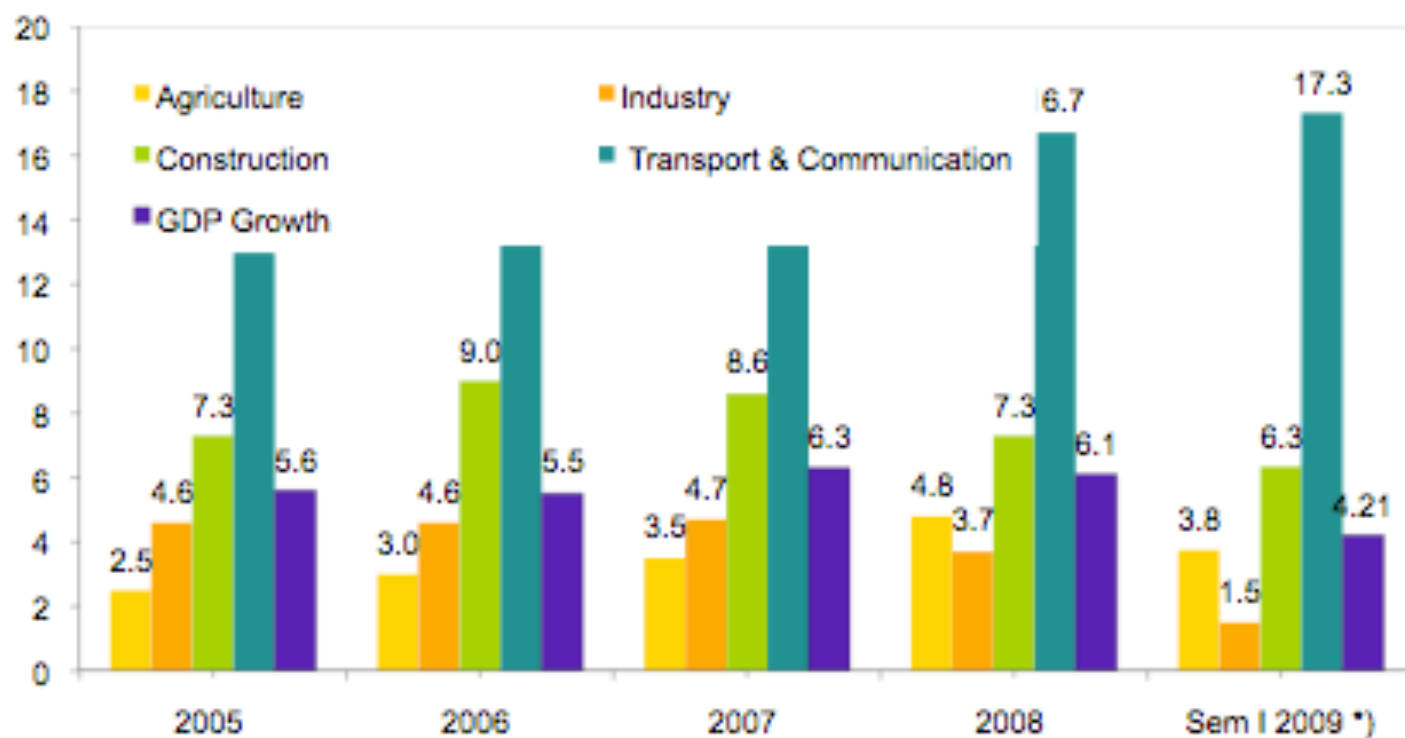
- Positive sentiments with relatively “stable” politics (JSE Index doubled, 5.6-6.2% growth, increased exports)
- Macro economics did not match with micro-economic (household) indicators

Bureaucratic Politics, Problems of Local Administrative Capacity;

- Conflicts among cabinet members & departments (MoF, MoHA, Bappenas, Technical Departments)
- Lack of local capacity: local autonomy is not supported with competent officials.

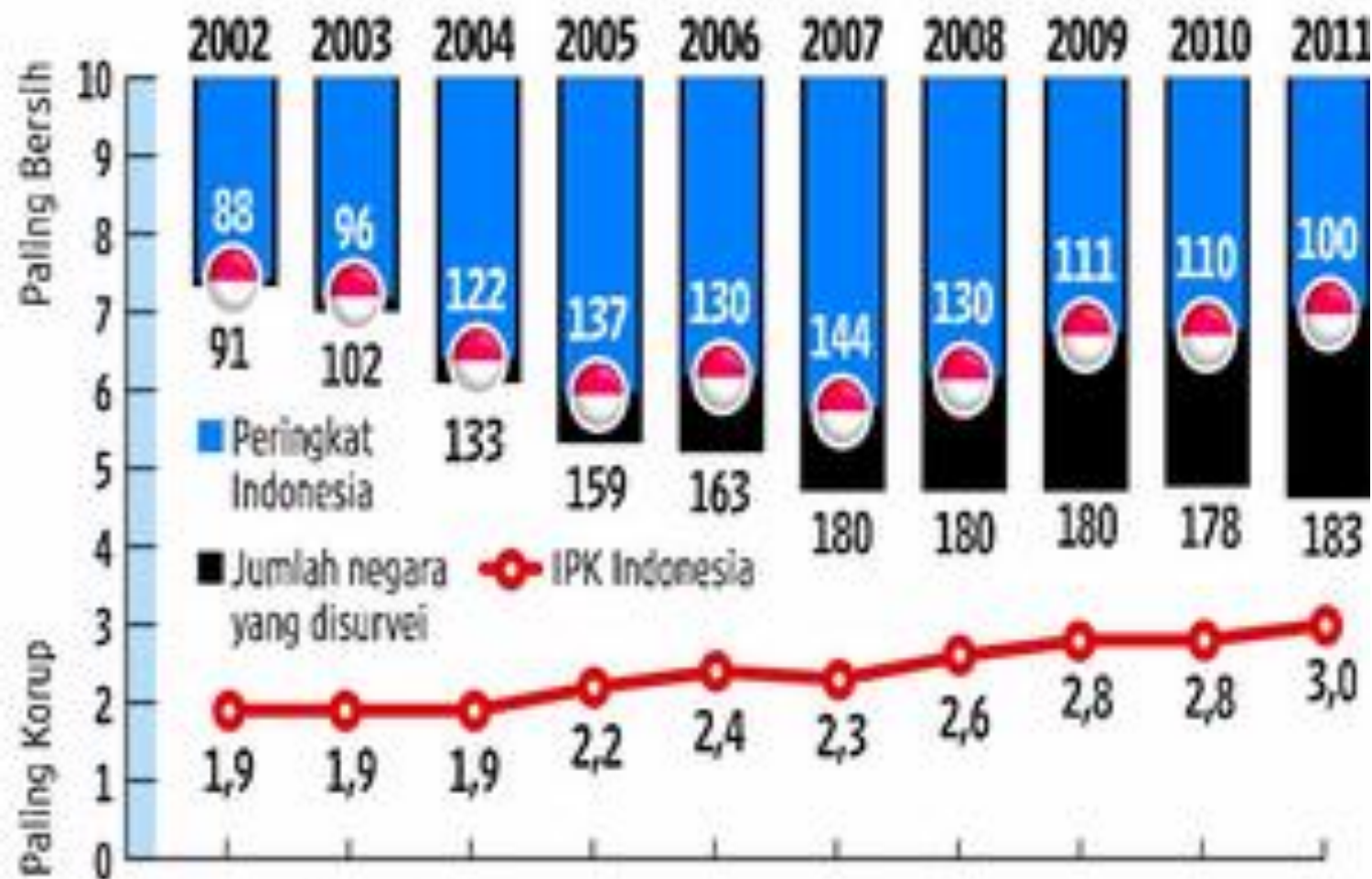
Trends of De-industrialization

Figure 2. Gross Domestic Product Growth by Sectors (Percent)



Source: Indonesian Central Bureau of Statistics

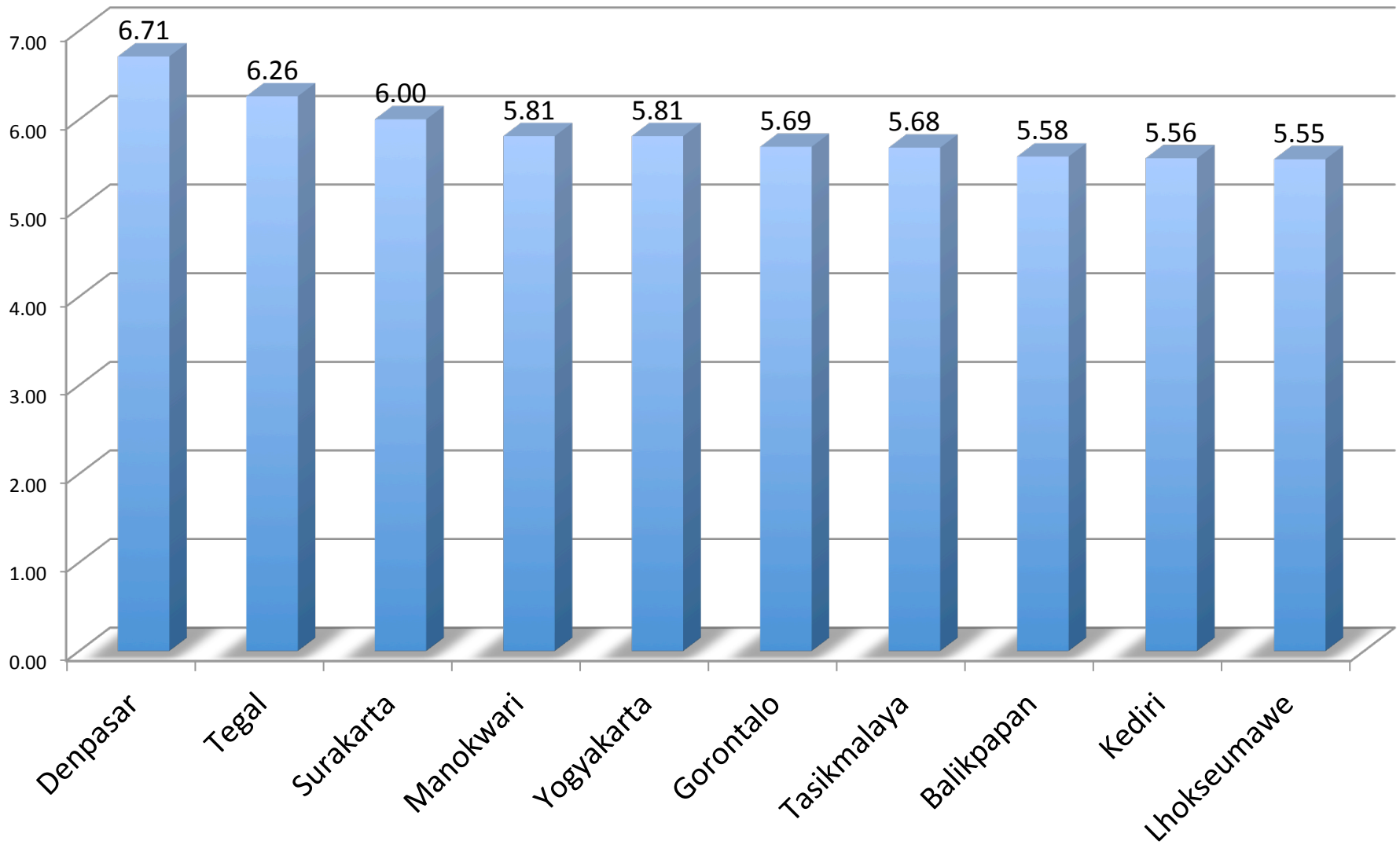
INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA



Sumber: Transparency International

GUNAWAN

10 Besar Kota IPK Tertinggi, Th 2012

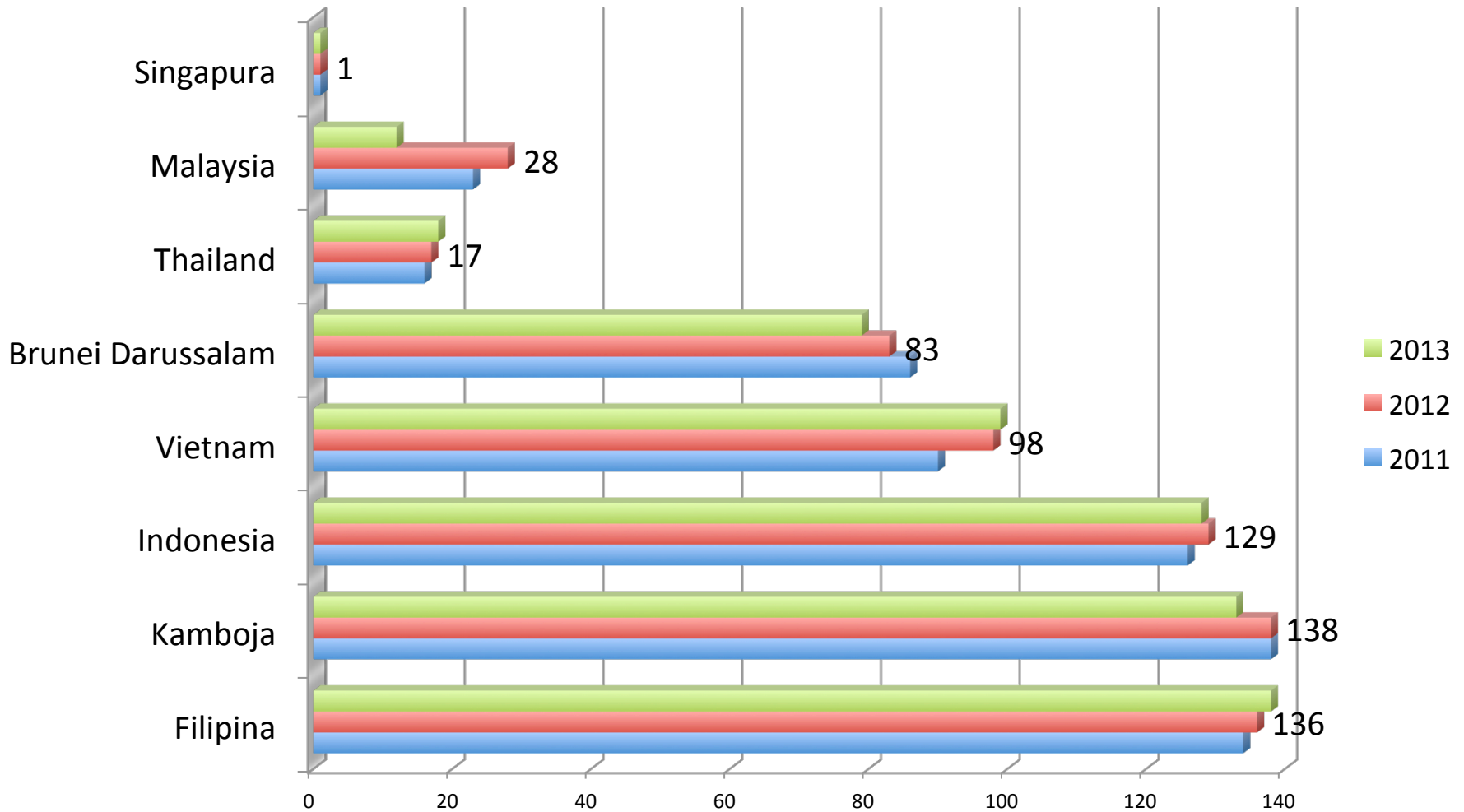


Iklm Bisnis Di Indonesia

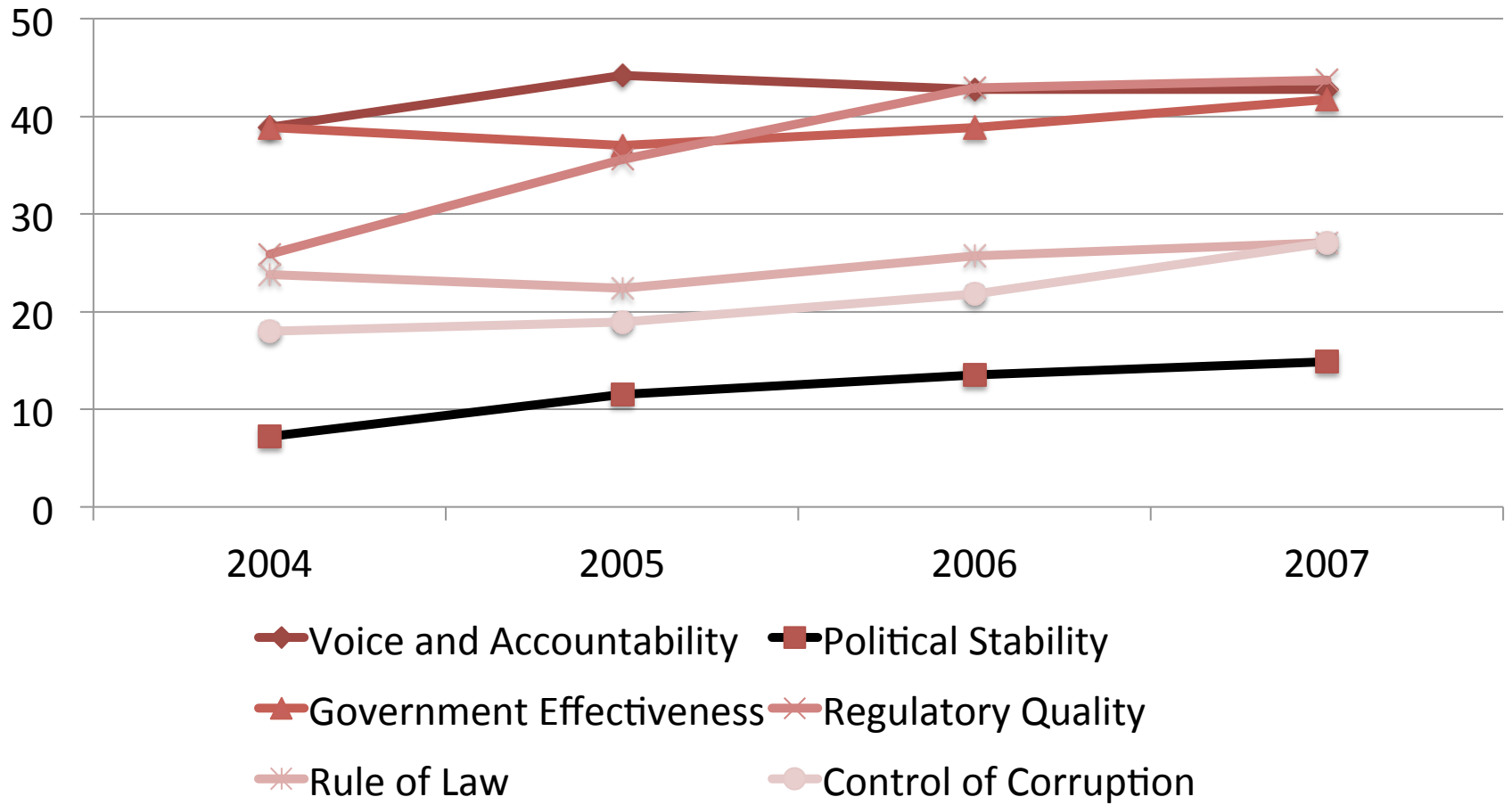
Ease of...	2007 rank	2006 rank	2005 rank
Starting a Business	167	161	161
Dealing with Licenses	179	131	129
Employing Workers	160	140	141
Registering Property	101	120	118
Getting Credit	116	83	76
Protecting Investors	49	60	58
Paying Taxes	111	133	129
Trading Across Borders	39	60	55
Enforcing Contracts	140	145	144
Closing a Business	139	136	126

Sb: The International Financial Corporation (IFC), "Doing Business 2005-2008"

Ranking Kemudahan untuk Menjalankan Usaha



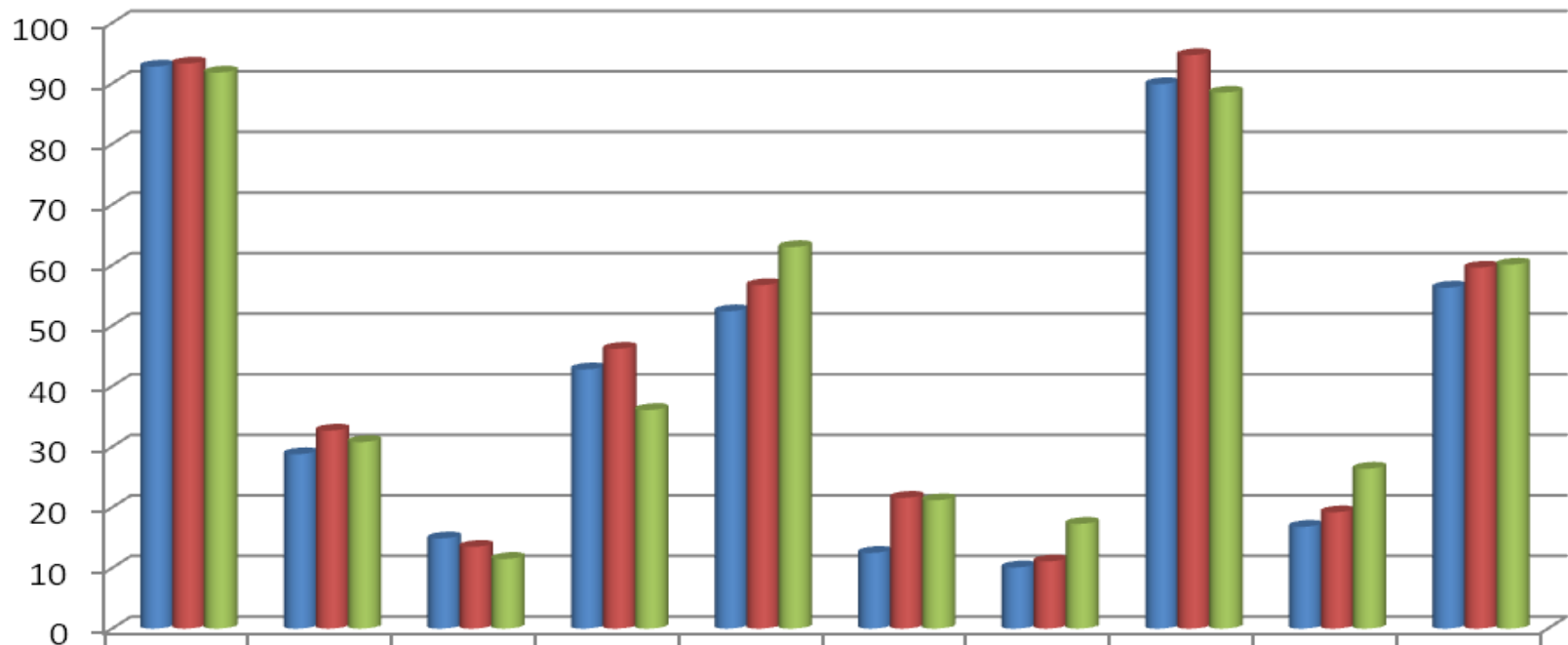
Perkembangan Indeks Governance 2004-2007



Perbandingan dengan Negara Lain

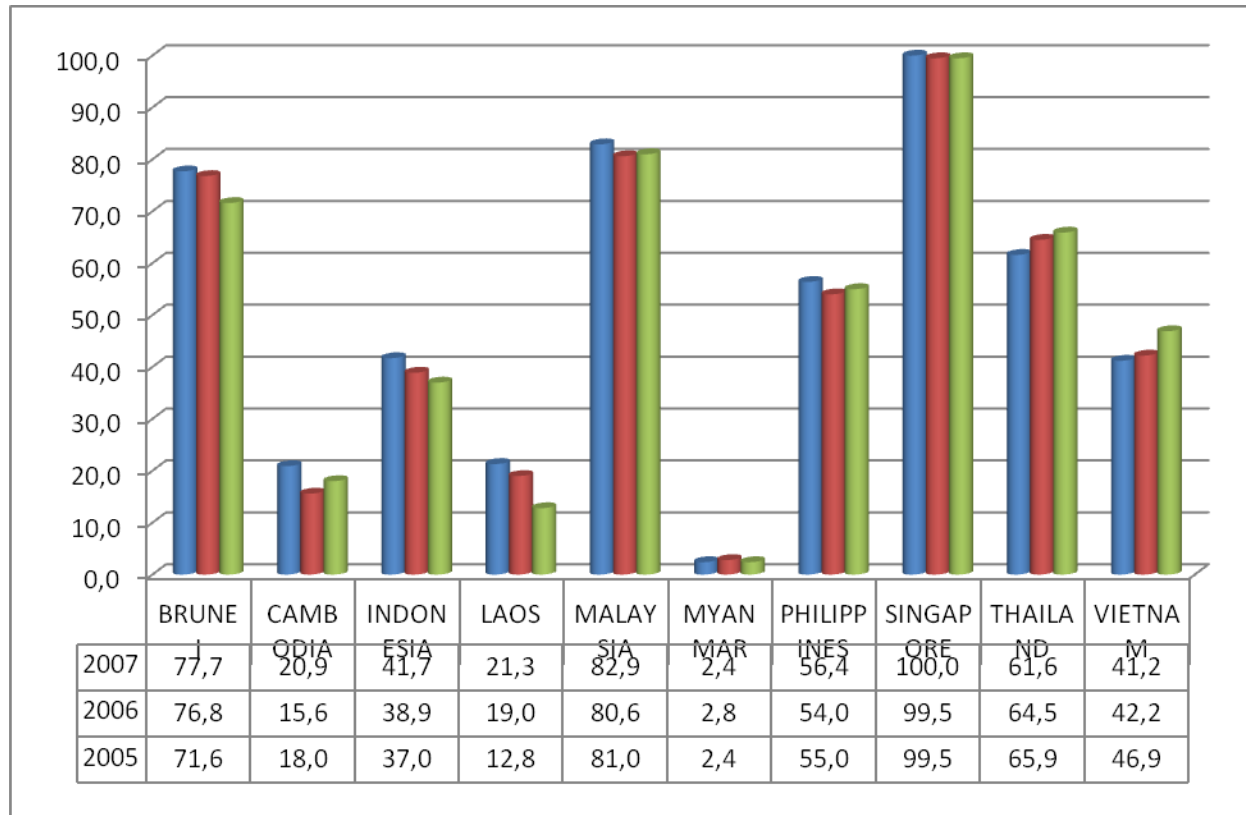
- Meskipun ada trend peningkatan indeks governance di Indonesia dari 2004-2010, tetapi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain, peningkatan tersebut belum signifikan.

Political stability

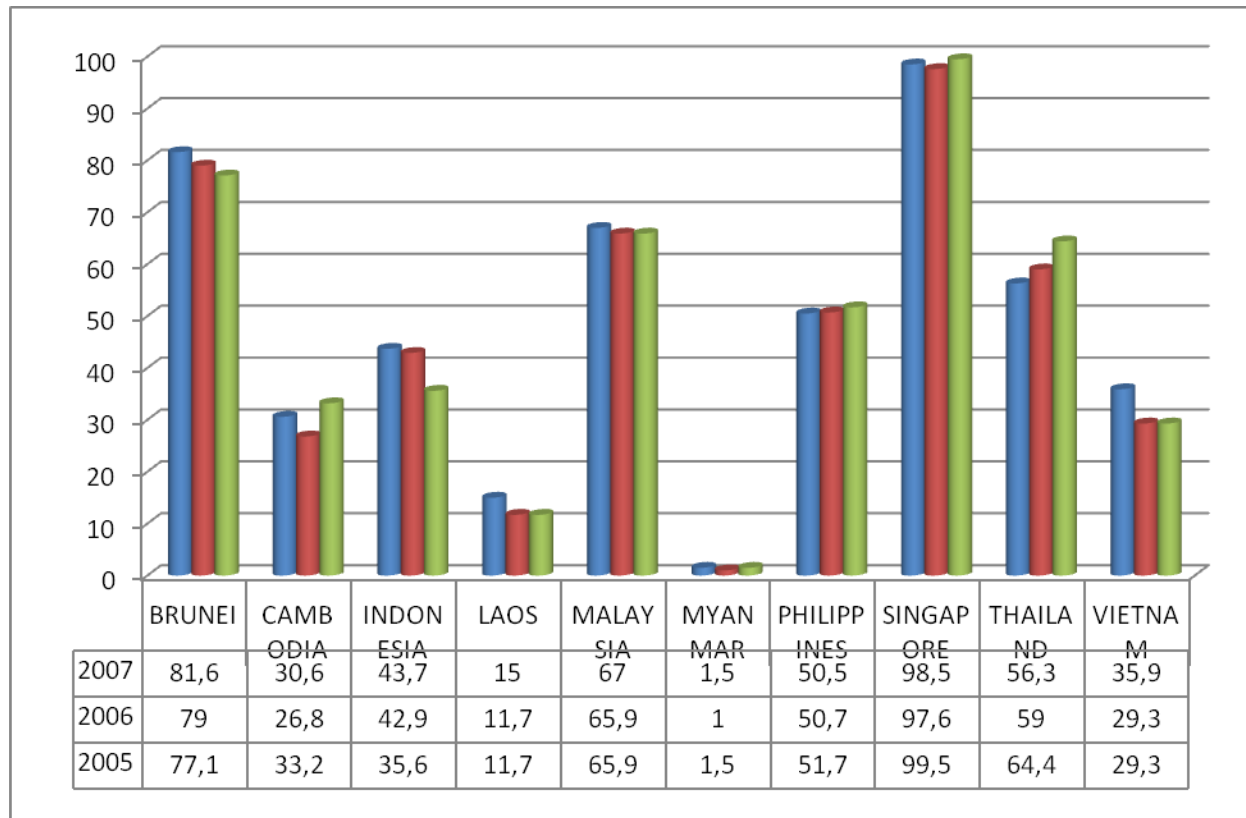


	BRUNEI	CAMB	INDON	LAOS	MALAY	MYAN	PHILIPP	SINGAP	THAILA	VIETNA
2007	92,8	28,8	14,9	42,8	52,4	12,5	10,1	89,9	16,8	56,3
2006	93,3	32,7	13,5	46,2	56,7	21,6	11,1	94,7	19,2	59,6
2005	91,8	30,8	11,5	36,1	63	21,2	17,3	88,5	26,4	60,1

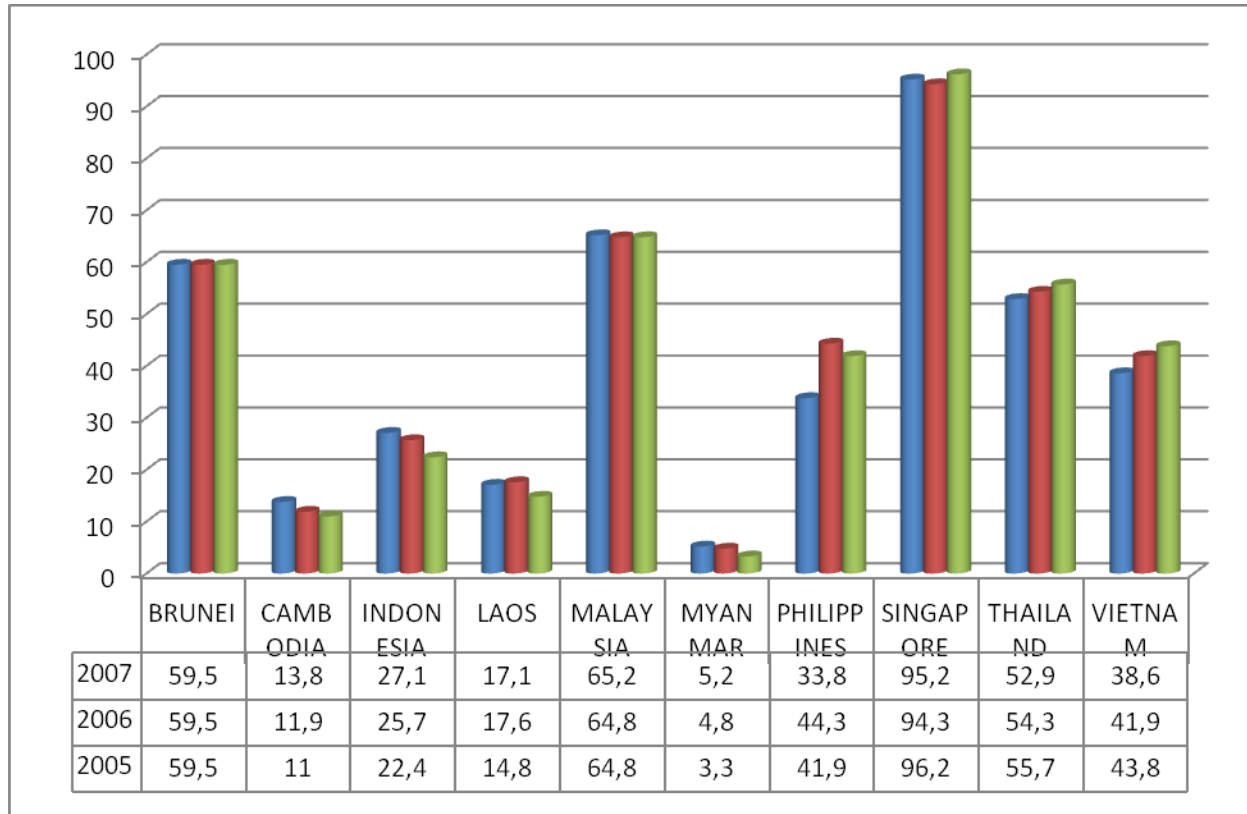
Government effectiveness



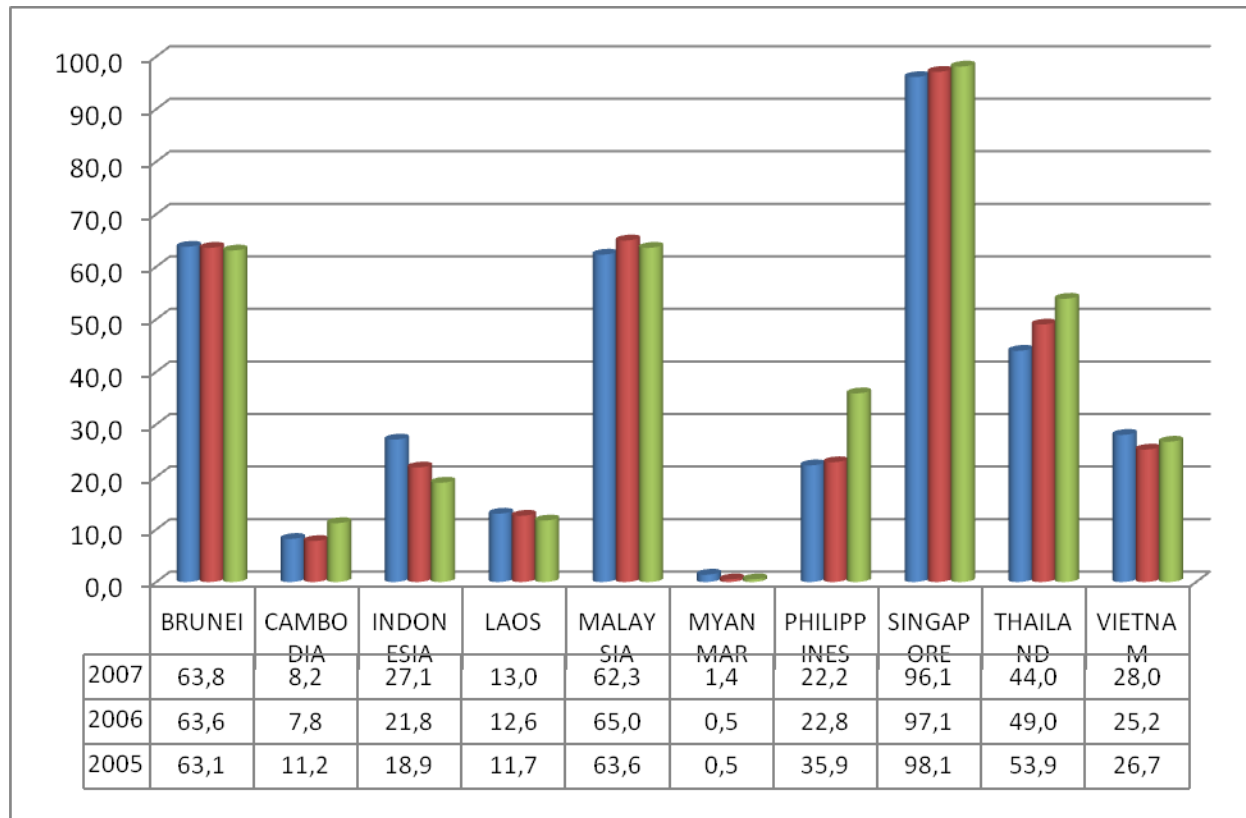
Quality of Regulation



Rule of law



Control of corruption

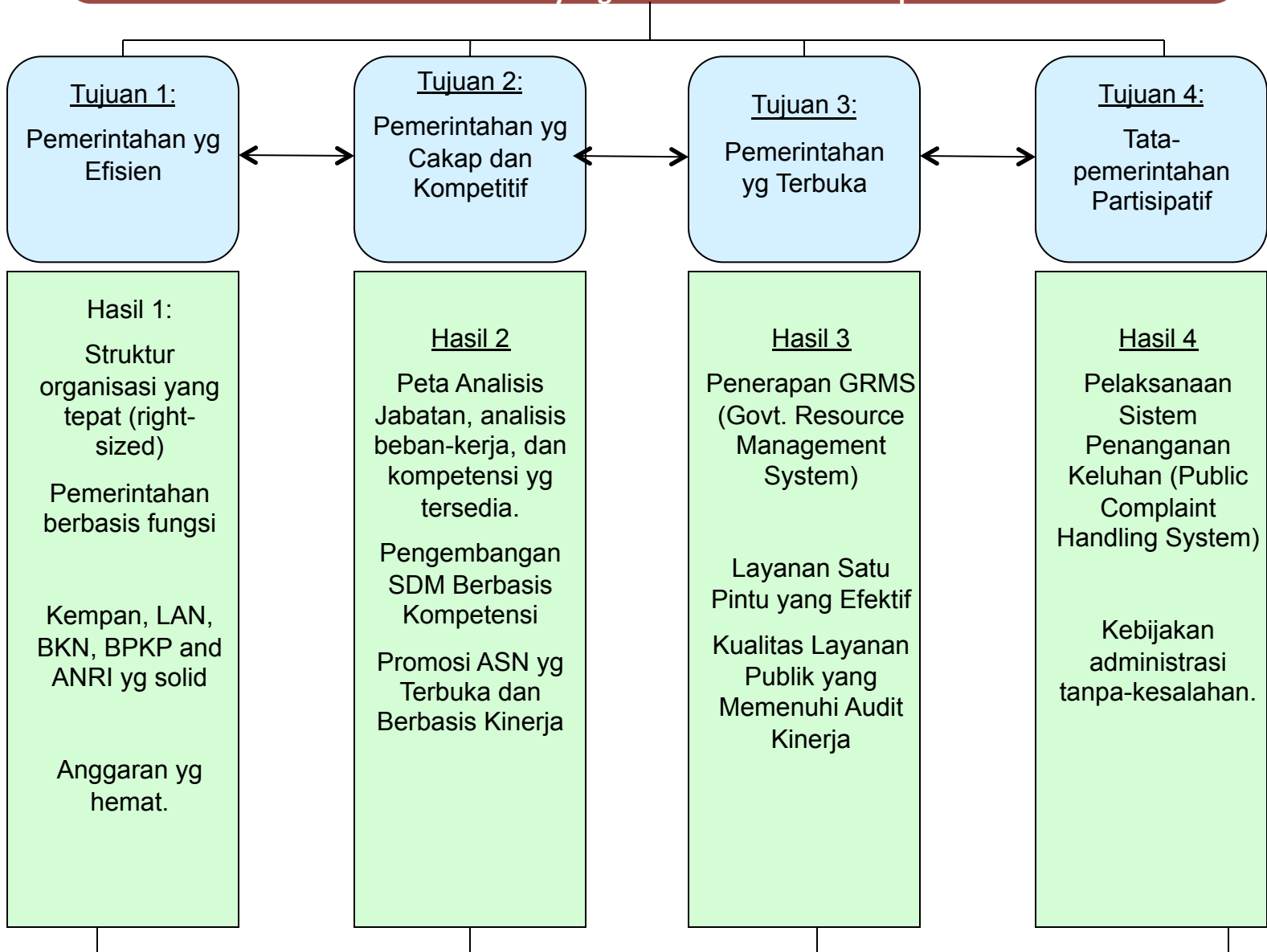


Tantangan Reformasi Birokrasi

Dalam RPJMN 2009-2014, Reformasi Birokrasi ditempatkan sebagai prioritas tertinggi karena peranannya dalam menentukan prioritas lainnya.

Target	Indikator		Baseline (2009)	Target (2014)
Menciptakan pemerintahan yg bersih (bebas dari korupsi)	Indeks Persepsi Korupsi		2,8	5,0
	Opini WTP menurut BPK	Pusat	42,17%	100%
		Daerah	2,73%	60%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Integritas Nasional	Nasional	6,64	8,0
		Daerah	6,46	8,0
	Peringkat kemudahan menjalankan bisnis		122	75
Pengembangan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.	Indeks Efektivitas Pemerintahan		-0,29	0,5
	Penyampaian LAKIP		24%	80%

**Sasaran RB: Kualitas Pelayanan, Pemerintahan yang Cakap dan Bertanggungjawab,
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi**



9 Program Akselerasi Menpan & RB: Sudah Terlaksana? Apakah hasilnya signifikan?

Manajemen Organisasi

Distribusi Layanan Publik yg Berkualitas

Rekrutmen dan Sistem Promosi Terbuka

Profesionalisasi Layanan Publik

E-Government

Deregulasi Perijinan dan Debirokratisasi

Sistem Pelaporan Aset dan Kekayaan Negara

Sistem Remunerasi

Efisiensi Lembaga Pemerintah

Identifikasi Masalah

Harus Berbasis Data, Sistemik, dan Tuntas

1. Sistem karir yg tertutup → tidak memadai dengan tantangan dunia bisnis yg kompetitif di tingkat global
2. Sentralisasi manajemen kepegawaian → Bgm menjawab kebutuhan SDM di daerah dan menjamin mobilitas aparatur antar-sektor?
3. Hubungan antara pejabat politik dan birokrasi yg tidak sehat
4. Sistem penggajian tidak mampu mendorong produktivitas dan menciptakan keadilan.